

Model Ekowisata Urban dan Dampak Pariwisata Massal pada Pengembangan Kawasan Ibu Kota Nusantara

Ahmad Ghazy Dananjaya¹, Muhammad Rakatama Faarhan²

¹Institut Teknologi Bandung, ahmadghazydananjaya@gmail.com

²Institut Teknologi Bandung, Rakatama@gmail.com

Article Info	ABSTRAK
<p>Article history: Received 29 Apr, 2025 Revised 5 Mei, 2025 Accepted 6 Mei, 2025</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Model Ekowisata Urban dan Dampak Pariwisata Massal pada Pengembangan Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan fokus pada keberlanjutan dan integrasi pariwisata dengan konsep kota hijau. Menggunakan pendekatan metode campuran (mixed method), penelitian ini menggabungkan analisis data kualitatif dan kuantitatif yang melibatkan 400 responden. Teknik pengambilan sampel kuantitatif dilakukan dengan random sampling untuk memastikan keterwakilan yang proporsional dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk masyarakat lokal dan wisatawan yang terlibat dalam kegiatan pariwisata di IKN. Sedangkan teknik pengambilan sampel kualitatif dilakukan dengan purposive sampling, di mana wawancara mendalam dilakukan terhadap pemangku kepentingan utama, seperti pengelola destinasi wisata, pemerintah daerah, dan anggota masyarakat yang terlibat langsung dalam industri pariwisata. Penelitian ini menilai potensi dan tantangan pengembangan ekowisata urban, termasuk pengelolaan atraksi wisata alam, aksesibilitas, fasilitas akomodasi, dan interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal. Novelty penelitian ini terletak pada pengintegrasian model ekowisata urban dengan konsep kota hijau di IKN, serta analisis menyeluruh mengenai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pariwisata massal untuk perencanaan pariwisata berkelanjutan.</p>
<p>Kata Kunci: Ekowisata Urban; Pengembangan Kawasan Pariwisata Berkelanjutan; Dampak Sosial dan Ekonomi</p>	



managers, local government, and community members directly involved in the tourism industry. This study evaluates the potential and challenges of urban ecotourism development, including natural attractions management, accessibility, accommodation facilities, and the interaction between tourists and local communities. The novelty of this research lies in integrating the urban ecotourism model with the green city concept in IKN, offering a comprehensive analysis of the social, economic, and environmental impacts of mass tourism for sustainable tourism planning.

Penulis Korespondensi:

Ahmad Ghazy Dananjaya,
Jl. Ganesa No. 10. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat Indonesia 40132
Email: ahmadghazydananjaya@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor utama yang telah lama berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Meski sektor ini terus mengalami ekspansi yang pesat, tantangan baru pun turut muncul, terutama dalam hal pengelolaan wilayah strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai calon ibu kota baru Indonesia, IKN dirancang dengan visi menjadi kota berwawasan lingkungan, berkelanjutan, serta berbasis konsep kota hijau. Relokasi pusat pemerintahan ini ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan kronis di Jakarta, seperti kemacetan lalu lintas, banjir, dan buruknya kualitas udara, serta menciptakan kota yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim (Rachmawati et al., 2024). Dengan visi tersebut, IKN diharapkan menjadi contoh kota masa depan yang mampu mengintegrasikan pembangunan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan (Rachmawati et al., 2024).

Semakin tingginya minat masyarakat terhadap IKN sebagai destinasi wisata telah memunculkan tantangan baru, khususnya terkait peran sektor pariwisata dalam mendukung pembangunan pusat pemerintahan tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologis. Selama periode libur Lebaran tahun 2025, terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah wisatawan yang mengunjungi IKN. Berdasarkan hasil kajian terkini, lebih dari separuh pengunjung tersebut berasal dari luar Kalimantan, mencerminkan tumbuhnya daya tarik IKN sebagai destinasi wisata berskala nasional yang inklusif dan berpotensi tinggi (Rachmawati et al., 2024). Hal ini mempertegas bahwa IKN tidak hanya dirancang untuk fungsi administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki posisi strategis sebagai kawasan pariwisata berbasis inovasi dan keberlanjutan.

Peningkatan angka kunjungan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan pengembangan destinasi di IKN mulai menunjukkan hasil. Namun demikian, di balik potensi ekonomi yang menjanjikan, terdapat urgensi untuk merancang strategi pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan guna menghindari dampak negatif terhadap ekosistem, sarana publik, dan kesejahteraan komunitas lokal. Tanpa perencanaan yang matang, pariwisata dalam skala besar berpotensi menimbulkan tekanan berlebih pada sumber daya alam dan infrastruktur, serta memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi di wilayah sekitar (Jati et al., 2023). Oleh karena itu, kajian terhadap dampak pariwisata sangat penting dilakukan dalam proses transformasi IKN, agar pembangunan kota ini benar-benar selaras dengan prinsip kota hijau yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.



Gambar 1. Kawasan Ibu Kota Nusantara
Sumber: RBI, di Olah Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model ekowisata urban dalam konteks pengembangan kawasan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan titik fokus pada integrasi keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sektor pariwisata dalam kerangka kota hijau. Penelitian ini juga mengeksplorasi strategi pengelolaan pariwisata massal agar sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, mengingat potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan jika tidak dikelola dengan baik. Permasalahan yang dikaji mencakup: bagaimana pariwisata berkontribusi terhadap keberlanjutan sosial dan ekonomi di kawasan IKN; tantangan apa saja yang muncul dalam pengelolaan pariwisata di tengah perkembangan wilayah ini; serta sejauh mana aktivitas pariwisata massal mempengaruhi pembangunan infrastruktur dan kualitas lingkungan di IKN.

Penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan menyoroti keterkaitan antara pengelolaan pariwisata massal dan strategi pembangunan pemerintahan yang berorientasi pada keberlanjutan di IKN. Dalam hal ini, pariwisata tidak hanya dipahami sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai sektor yang harus dikelola secara bijak agar tidak menimbulkan beban sosial maupun degradasi ekologis. Pengalaman kawasan Jabodetabek yang selama ini menghadapi tekanan akibat mega-urbanisasi menjadi pelajaran penting. Sebagai bentuk respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah menetapkan visi pembangunan rendah emisi karbon dan menargetkan IKN sebagai salah satu kota paling layak huni secara global (Jati et al., 2023). Berdasarkan visi tersebut, penelitian ini dirancang untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pengelolaan pariwisata di IKN yang tidak hanya memperkuat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menurunkan tekanan terhadap infrastruktur, kualitas lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Komitmen pemerintah dalam menjadikan IKN sebagai kota inklusif dan ramah lingkungan menegaskan arah pembangunan yang menempatkan keseimbangan ekologis dan sosial sebagai pilar utama dalam setiap kebijakan tata ruang (Jati et al., 2023).

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur juga dipandang sebagai momentum strategis dalam proses transformasi Indonesia menuju negara yang lebih modern, berdaya saing, dan berkelanjutan di berbagai sektor. Relokasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan keinginan untuk melepaskan diri dari berbagai kompleksitas perkotaan di Jakarta dan mempercepat pemerataan pembangunan nasional (Jati, 2023). Selaras dengan itu, strategi branding IKN sebagai "Kota Hutan Berkelanjutan" merepresentasikan upaya untuk mengintegrasikan ekosistem darat dan laut yang menjadi identitas geografis kawasan tersebut. Pendekatan ini memperkuat citra IKN sebagai kota yang tidak hanya berkembang secara fungsional, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis dan keberlanjutan lingkungannya (Warouw et al., 2024). Lebih dari sekadar pusat pemerintahan, IKN juga diposisikan sebagai simbol diplomasi lingkungan Indonesia di kancah global, yang mencerminkan kemampuan bangsa dalam merancang

kota hijau yang dapat menjadi etalase pembangunan berwawasan lingkungan. Strategi ini merupakan bagian dari agenda yang lebih luas untuk memperkuat reputasi Indonesia di tingkat internasional melalui pendekatan berkelanjutan dan kesadaran terhadap isu lingkungan global (Warouw et al., 2024).

Pemindahan ibu kota yang diprakarsai oleh Presiden Joko Widodo menandai pergeseran mendasar dalam paradigma perencanaan kota di Indonesia, dari model pertumbuhan yang organik menuju pembangunan kota yang dirancang secara sistematis dan terstruktur. Dalam kerangka tersebut, Ibu Kota Nusantara (IKN) diposisikan sebagai representasi masa depan Indonesia—sebuah kota yang tidak hanya efisien dalam pengelolaan ruang, tetapi juga sejalan dengan aspirasi nasional terhadap keberlanjutan dan tata kelola ekologis (Perwira et al., 2024). Kebijakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur yang dimulai pada tahun 2019 merupakan strategi negara dalam merespons pertumbuhan penduduk dan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan serta potensi pariwisata yang terus bertumbuh (Rachmawati et al., 2024). Dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, pengembangan IKN membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama relokasi ini adalah mewujudkan kota yang berorientasi pada ekologi dan menjadi simbol pembangunan nasional berbasis keberlanjutan (Rachmawati et al., 2024).

Dalam konteks tersebut, pengembangan ekowisata yang melibatkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal menjadi langkah penting dalam menciptakan keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian alam. Seperti yang dijelaskan oleh Asmuni dan Farida (2024), integrasi antara budaya dan teknologi dalam pengembangan sektor pariwisata tidak hanya menciptakan pengalaman wisata yang inovatif, tetapi juga harus mempertahankan otentisitas nilai-nilai lokal agar tidak tereduksi oleh modernisasi. Konsep *city branding* dalam hal ini bukanlah sekadar urusan simbolik seperti logo atau slogan, tetapi merupakan proses yang lebih dalam dalam membentuk identitas kota yang dapat membangun keterhubungan emosional antara pengunjung dan budaya lokal (Sadykova et al., 2025). Dalam konteks pembangunan IKN, penguatan identitas sebagai kota hutan berkelanjutan menuntut komitmen kolektif dari seluruh unsur pentahelix agar visi tersebut dapat terwujud secara utuh dan aplikatif (Warouw et al., 2024).

Lebih lanjut, perencanaan kota berkelanjutan juga harus mampu mengakomodasi keragaman budaya dan struktur sosial masyarakat urban sebagai landasan terciptanya kota yang inklusif dan berdaya tahan (Klingmann, 2022). Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan kawasan IKN sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas sektor serta kesadaran kolektif terhadap dinamika sosial dan ekologis yang berkembang. Perencanaan yang berkelanjutan bukanlah proses yang linier, melainkan bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan, sehingga dapat menciptakan pertumbuhan kota yang organik dan kontekstual (Klingmann, 2022). Contoh nyata dinamika pariwisata dapat dilihat dari fenomena turisme harian di Procida, di mana kunjungan wisatawan yang tinggi pada siang hari tetapi rendah pada malam hari menghasilkan pola aktivitas yang berbeda dengan destinasi seperti Capri dan Ischia (Ciuculescu & Luca, 2024). Pola ini bukan hanya memengaruhi ritme sosial masyarakat lokal, tetapi juga berperan dalam membentuk persepsi destinasi di benak wisatawan. Dalam hal ini, proses reifikasi ruang turut membangun narasi baru tentang identitas destinasi tersebut, yang kemudian memengaruhi persepsi kolektif (Klingmann, 2022).

Untuk itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam proses *place branding* menjadi sangat penting guna memastikan representasi kota mencerminkan nilai-nilai budaya dan identitas komunitas (Sadykova et al., 2025). Budaya memainkan peran strategis dalam pembangunan kota karena dapat memperkuat identitas lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas, serta memperkuat kohesi sosial dan keberlanjutan

(Ciuculescu & Luca, 2024). Oleh sebab itu, budaya seharusnya menjadi pilar utama dalam strategi *place branding* dan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan kota. Keberhasilan *city branding* tidak semata bergantung pada kekuatan visual atau kampanye pemasaran, tetapi ditentukan oleh sejauh mana identitas lokal diselaraskan dengan arah kebijakan nasional dan regional (Huseynli, 2023). Sinergi antarlevel pemerintahan menjadi fondasi utama untuk memastikan citra kota tetap relevan, konsisten, dan berakar pada kearifan lokal.

Lebih jauh lagi, pembangunan citra kota merupakan investasi jangka panjang yang memerlukan strategi yang konsisten dan komitmen berkelanjutan. Branding kota bukan hanya tentang pencitraan sesaat, tetapi tentang membangun persepsi yang otentik dan mendalam, yang mampu meningkatkan daya tarik pariwisata serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Huseynli, 2023). Dalam kerangka ini, *place branding* seharusnya dipahami sebagai proses emosional dan relasional yang menumbuhkan kedekatan antara masyarakat dan ruang kota (Sadykova et al., 2025). Penciptaan pengalaman wisata yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif menjadi elemen kunci dalam mewujudkan keterikatan emosional yang berkelanjutan. Interaksi langsung antara warga dan wisatawan dapat memperkuat rasa kepemilikan terhadap tempat, sekaligus membangun basis keberlanjutan pariwisata berbasis budaya.

Namun demikian, tantangan utama dalam pengelolaan pariwisata di IKN terletak pada upaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip ekologi. Sebagai kota yang dirancang dengan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan, IKN memerlukan perencanaan sistem pariwisata yang terintegrasi agar tidak menimbulkan tekanan ekologis yang berlebihan. Berdasarkan pernyataan dari Ketua Transformasi Teknologi dan Inovasi Otorita IKN, wilayah Nusantara akan dikembangkan sebagai kota hutan, dengan komposisi 65% kawasan hutan tropis dan 35% wilayah urban terstruktur (Asmuni & Farida, 2024). Desain ini menjadi cerminan komitmen terhadap pelestarian lingkungan, sekaligus menjadikan ekowisata sebagai bagian dari strategi utama dalam pembangunan kota yang berkelanjutan.

Tabel 1. Aspek Pariwisata dalam Pengembangan IKN

Aspek	Detail
Ekowisata	Fokus pada pariwisata alam berbasis keberlanjutan.
Zonasi Pariwisata	Area untuk pengembangan wisata alam dan budaya.
Infrastruktur Pariwisata	Fasilitas seperti hotel, pusat MICE, dan pusat perbelanjaan.
Destinasi Wisata Alam	Kalimantan Timur, dengan hutan tropis dan ekosistem laut sebagai daya tarik wisata.
Peluang Ekonomi Pariwisata	Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata.
Fasilitas Wisata	Pengembangan pusat perbelanjaan, hotel, dan kawasan wisata.

Perencanaan sektor pariwisata di Ibu Kota Nusantara (IKN) seharusnya difokuskan pada pengembangan pariwisata alam yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Tujuan utama dari pendekatan ini tidak hanya sebatas menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga menjaga kualitas ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lokal. Sebagai kota yang mengusung konsep kota hijau, IKN menekankan pentingnya penerapan *nature-based solutions* (NBS), yaitu strategi pembangunan yang mengintegrasikan infrastruktur kota dengan pelestarian lingkungan secara harmonis. Dalam kerangka ini, pengelolaan pariwisata massal harus mempertimbangkan kapasitas daya dukung ekologis dan infrastruktur secara cermat. Sejalan dengan visi jangka panjang tersebut, IKN ditargetkan menjadi "kota global inklusif" pada tahun 2045, dengan komitmen terhadap nol emisi karbon dan aspirasi untuk meraih status sebagai salah satu kota paling layak huni di dunia (Jati et al., 2023).

Berdasarkan arah pembangunan tersebut, strategi pengembangan pariwisata perlu diformulasikan secara hati-hati untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan fisik dan sosial, serta sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini disusun untuk memberikan masukan kebijakan dalam pengelolaan sektor pariwisata yang sejalan dengan penerapan konsep ekowisata urban berkelanjutan di IKN. Fokus utama diarahkan pada integrasi sektor pariwisata ke dalam kerangka perencanaan kota hijau, dengan mempertimbangkan secara holistik dampak sosial, ekonomi, dan ekologi yang mungkin muncul.

Sebagai bagian dari implementasi konsep *Kota Hutan Berkelanjutan*, pengelolaan sektor pariwisata di IKN harus berlandaskan pada kebijakan yang berpihak pada pelestarian sumber daya alam dan penciptaan harmoni sosial. Kebijakan relokasi ibu kota dari Jakarta ke wilayah Nusantara di Kalimantan Timur tidak semata bertujuan mengurai permasalahan urbanisasi lama, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk mendorong transformasi Indonesia menuju negara maju yang kompetitif dari segi ekonomi, sosial, dan budaya (Jati, 2023).

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Buku Saku IKN, diperoleh data.

Tabel 2. Data Geografis IKN

Aspek	Detail
Lokasi Geografis	Terletak di Kalimantan Timur, Indonesia, diposisikan secara sentral di dalam negara.
Ukuran Area (IKN)	256.142,72 hektar
Kota-Kota Terdekat	Balikpapan, Samarinda
Fitur Keberlanjutan	75% dari area akan dijadikan ruang terbuka hijau (65% hutan yang dilindungi, 10% untuk produksi pangan)
Rencana Energi	100% energi bersih
Rencana Transportasi	80% perjalanan akan dilakukan melalui transportasi publik atau mobilitas aktif
Proyeksi Populasi (2045)	1,9 juta orang
Fokus Ekonomi	Bertujuan menjadi superhub untuk perdagangan, inovasi, dan energi rendah karbon
Infrastruktur Utama	Bangunan pemerintah pusat, Istana Kepresidenan, gedung legislatif, dan pangkalan militer
Sektor Kunci untuk Pengembangan	Energi, pertanian, kota pintar, pendidikan, pariwisata, dan industri
Model Kolaborasi	Kemitraan Publik-Swasta (PPP) untuk infrastruktur, dengan beberapa proyek didanai oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

Dalam perencanaan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), salah satu fokus strategis yang diutamakan adalah bagaimana konsep ekowisata urban dapat diintegrasikan secara utuh ke dalam pembangunan kawasan pusat pemerintahan. Berlokasi di Kalimantan Timur dan mencakup wilayah seluas 256.142,72 hektar, IKN dirancang sebagai kota berkelanjutan yang mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berimbang. Namun demikian, penerapan pariwisata massal di kawasan ini memiliki potensi menimbulkan berbagai dampak sosial, antara lain terjadinya disrupsi struktur sosial masyarakat lokal dan potensi melebarnya kesenjangan antara penduduk asli dan wisatawan (Scheyvens, 2002). Dari perspektif ekonomi, pariwisata massal dapat berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi, khususnya di sektor-sektor strategis seperti transportasi, perhotelan, dan jasa pariwisata. Akan tetapi, jika tidak direncanakan dan dikelola secara holistik, dampak negatif seperti inflasi harga lokal, kemacetan, hingga kesenjangan ekonomi dapat terjadi. Relokasi besar-besaran yang melibatkan sekitar 1,9 juta penduduk dari Jakarta ke wilayah IKN turut menjadi perhatian penting dalam diskursus perencanaan wilayah dan pembangunan nasional (Whincup et al., 2024).

Dalam konteks pembangunan IKN sebagai kota baru, prinsip keberlanjutan menjadi pilar utama. Sejalan dengan panduan UN-Habitat (2016), kota yang berkelanjutan harus mampu memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Penerapan prinsip ini di IKN tercermin melalui komitmen terhadap penggunaan energi terbarukan, sistem pengelolaan air yang efisien, serta pelestarian kawasan ruang terbuka hijau dengan partisipasi masyarakat lokal. Selain itu, identitas sosiolinguistik IKN yang berkembang dalam lanskap multikultural dan konektivitas digital juga menjadi bagian penting dari narasi pembangunan (Puspitasari et al., 2024). Pembelajaran penting dapat diambil dari studi perbandingan relokasi ibu kota di negara lain, seperti Brasilia di Brasil dan Canberra di Australia. Kedua kota tersebut menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang matang dan fokus pada prinsip keberlanjutan, pembangunan ibu kota baru dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih merata secara geografis serta memperkuat sistem pemerintahan yang efisien. Brasilia berhasil mendorong pembangunan kawasan tengah Brasil dan mengurangi kesenjangan regional, sementara Canberra mencerminkan keseimbangan antara pembangunan ekologis dan sosial.

Namun demikian, pengembangan IKN juga menghadapi berbagai kritik, terutama yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat lokal di Kalimantan Timur dan isu hukum serta politik pada level nasional (Marzuki, Heryansyah, & Hadi, 2024). Hal ini menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi keadilan sosial dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan secara menyeluruh. Sebagai bentuk konkret dari komitmen terhadap keberlanjutan, desain tata ruang IKN menetapkan bahwa 75% dari total area akan dijadikan kawasan ruang terbuka hijau. Dari luasan tersebut, sebanyak 65% akan difungsikan sebagai hutan lindung dan 10% sebagai lahan pangan. Di sektor energi, IKN ditargetkan memanfaatkan 100% energi bersih dan menerapkan sistem transportasi yang berkelanjutan. Proyeksi menunjukkan bahwa 80% mobilitas warga akan menggunakan transportasi publik atau moda aktif seperti berjalan kaki dan bersepeda (Pradana et al., 2025).

Dalam kerangka pengembangan ekowisata urban, tantangan utama IKN adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor pariwisata dengan perlindungan terhadap keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Mengingat IKN dirancang sebagai pusat ekonomi baru berbasis inovasi, perdagangan, dan energi rendah karbon, maka pengelolaan arus wisatawan perlu dilakukan secara hati-hati. Jika tidak, lonjakan kunjungan wisata dapat menimbulkan tekanan besar terhadap infrastruktur, mempercepat degradasi lingkungan, dan memperparah kesenjangan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Pariwisata massal, yang ditandai oleh konsentrasi wisatawan dalam waktu dan tempat yang bersamaan, memang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur. Akan tetapi, jika tidak dikendalikan, dapat memicu kerusakan ekosistem, ketimpangan sosial, serta beban berat terhadap layanan publik (Ciuculescu & Luca, 2024). Sejumlah studi terdahulu bahkan menyatakan bahwa meskipun pariwisata skala besar memberikan keuntungan ekonomi, dampak negatif sosial-lingkungan yang ditimbulkan sering kali tidak terhindarkan (Asmuni & Farida, 2024).

Relokasi Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dan pembangunan IKN sebagai kota baru tidak hanya harus mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga etika dan keadilan sosial. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, relokasi ini dikategorikan sebagai bentuk *maṣlaḥah ḥājīyyah*—yaitu upaya untuk mengatasi kesulitan hidup masyarakat dan menciptakan kondisi kehidupan bersama yang lebih layak dan berkelanjutan (Asmuni & Farida, 2024). Pengembangan kawasan administratif seperti IKN memerlukan perencanaan yang mencakup aspek infrastruktur, sosial, dan ekonomi secara integratif. Menurut Hillier (2012), pembangunan kawasan pemerintahan yang berkelanjutan harus berbasis pada perencanaan kota yang menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat dan kelestarian

lingkungan. Oleh karena itu, konsep "kota hijau" dalam pembangunan IKN diharapkan mampu mengurangi dampak negatif urbanisasi dan menciptakan ruang yang lebih sehat dan ramah lingkungan. IKN dirancang untuk menjadi entitas pemerintahan setingkat provinsi dengan status khusus sebagai ibu kota negara (Sensuse et al., 2022).

Pengelolaan pariwisata massal di IKN tidak boleh semata-mata bertumpu pada tujuan ekonomi, melainkan juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Sebagai kota baru yang dibangun dengan semangat keberlanjutan, IKN menekankan pendekatan *nature-based solutions* (NBS) yang menyelaraskan pembangunan dengan pelestarian alam (Rachmawati et al., 2024). Dalam konteks ini, model ekowisata urban dapat menjadi solusi strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif tanpa merusak lingkungan. Pengelolaan ekowisata berbasis kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal merupakan langkah penting untuk menciptakan sinergi antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan. Salah satu pendekatan yang direkomendasikan adalah mengintegrasikan kawasan administratif pemerintahan dengan kawasan wisata alam secara terencana dan berkelanjutan. Jika dikelola dengan tepat, ekowisata dapat memperkuat ekonomi lokal dan sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed method), yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai model ekowisata urban dalam pengembangan kawasan pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pendekatan kuantitatif memberikan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik, sementara pendekatan kualitatif mengungkap wawasan lebih mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti, khususnya dampak pariwisata dan pembangunan kawasan pemerintahan berbasis keberlanjutan di IKN. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian ini memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk menghasilkan temuan yang lebih holistik terkait pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur dampak yang dapat dihitung secara objektif, seperti dampak ekonomi, sosial, dan infrastruktur dari model ekowisata urban di IKN. Survei dengan kuesioner menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data kuantitatif. Kuesioner ini terdiri dari pertanyaan tertutup yang dirancang untuk mengukur variabel-variabel seperti tingkat kunjungan wisatawan, pengeluaran wisatawan, serta persepsi masyarakat terhadap pengembangan kawasan IKN dengan konsep ekowisata urban. Dengan menggunakan teknik sampling acak, sebanyak 400 responden dipilih untuk memastikan representasi yang valid dari berbagai latar belakang, baik masyarakat lokal maupun wisatawan yang mengunjungi IKN.

Untuk memastikan ukuran sampel yang tepat, penelitian ini menggunakan rumus statistika untuk menentukan ukuran sampel yang representatif. Rumus yang digunakan adalah:

$$n = \frac{z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{e^2}$$

Dengan rumus ini, ukuran sampel yang diperoleh adalah 400 responden. Ukuran sampel ini dianggap cukup untuk memperoleh hasil yang valid dan mengurangi potensi bias dalam penelitian.

Setelah data survei dikumpulkan, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan uji regresi linier untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang terlibat. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan pola-pola yang muncul dari data kuantitatif, seperti frekuensi, rata-rata, dan distribusi dari variabel-variabel yang diukur. Selain itu, regresi linier sederhana digunakan untuk

mengukur pengaruh pariwisata massal terhadap variabel ekonomi dan infrastruktur dengan menggunakan rumus berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Regresi linier ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel independen (jumlah wisatawan) mempengaruhi variabel dependen (misalnya, pendapatan lokal atau kualitas infrastruktur) di IKN. Model regresi linier akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antar variabel-variabel tersebut.

Selain pendekatan kuantitatif, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan kualitatif guna menggali secara lebih mendalam pandangan dan pengalaman masyarakat serta pemangku kepentingan terkait penerapan model ekowisata urban dalam pembangunan kawasan pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Proses ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai aktor kunci, seperti perwakilan pemerintah lokal, pelaku industri pariwisata, dan komunitas lokal. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai dampak sosial dan budaya dari pariwisata massal, serta bagaimana integrasi pariwisata dan prinsip keberlanjutan diterapkan di IKN. Teknik wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti memiliki fleksibilitas dalam mengeksplorasi pandangan responden, serta memberikan ruang bagi mereka untuk menceritakan pengalaman secara bebas dan alami. Selain wawancara, metode Focus Group Discussion (FGD) juga diterapkan sebagai sarana untuk memperoleh sudut pandang yang lebih luas dan komprehensif terkait dampak pariwisata massal serta praktik ekowisata urban di IKN. FGD ini melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat lokal, pelaku usaha, dan ahli perencanaan tata kota. Diskusi kelompok ini dirancang untuk mengeksplorasi tantangan, peluang, dan konflik yang mungkin muncul dalam pengelolaan pariwisata, serta memahami dampaknya terhadap hubungan sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat. Melalui FGD, diperoleh pemahaman lebih baik mengenai dinamika sosial yang kompleks serta bagaimana praktik pariwisata massal dapat memengaruhi arah kebijakan pembangunan kota yang berkelanjutan.

Data yang diperoleh dari wawancara dan FGD dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola berulang dan tema-tema utama yang muncul dari hasil percakapan dan diskusi, sehingga dapat membangun interpretasi yang mendalam terkait isu sosial dan budaya yang timbul akibat pariwisata massal. Analisis ini digunakan untuk menyusun pemahaman yang lebih tajam mengenai implementasi ekowisata urban dalam menciptakan keseimbangan antara pembangunan fisik, keberlanjutan sosial, dan pelestarian lingkungan. Sebagai pelengkap, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku akademik, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan artikel yang membahas kebijakan pembangunan IKN serta strategi pariwisata berbasis keberlanjutan. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat temuan lapangan dan memperluas konteks analisis, sehingga menghasilkan kajian yang lebih tajam dan holistik.

Untuk menganalisis data secara keseluruhan, penelitian ini menggunakan pendekatan integratif yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif memberikan gambaran empiris yang dapat diukur secara statistik, sementara analisis kualitatif memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang tidak selalu terjangkau melalui angka. Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan landasan yang kuat dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dan efektif, khususnya dalam rangka mewujudkan model ekowisata urban berkelanjutan di wilayah administratif IKN. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan uji statistik *Independent Samples T-Test* untuk mengidentifikasi perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok responden yang terlibat, seperti masyarakat lokal dan wisatawan. Uji ini berguna untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi yang bermakna terhadap variabel-variabel yang diteliti. Rumus yang digunakan untuk pengujian T sampel independen adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

Dengan rumus ini, penelitian ini dapat mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam persepsi antara masyarakat lokal dan wisatawan mengenai dampak pariwisata massal dan pengembangan ekowisata urban di IKN.

Terakhir, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor etika dalam pengumpulan data. Semua responden diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan jaminan kerahasiaan data mereka. Partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela, dan responden dapat mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi. Dengan menjaga integritas dan etika penelitian, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengelolaan pariwisata dan pengembangan kawasan pemerintahan di IKN dengan model ekowisata urban yang berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dampak Ekonomi Model Ekowisata Urban di IKN

Berdasarkan hasil survei, sektor pariwisata berpotensi meningkatkan perekonomian lokal, terutama melalui pengeluaran wisatawan yang tinggi. Rata-rata pengeluaran wisatawan yang mengunjungi IKN menunjukkan bahwa sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi daerah. Hasil analisis regresi linier menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara jumlah wisatawan dan pendapatan lokal, mengindikasikan bahwa pariwisata berpotensi meningkatkan sektor-sektor seperti perhotelan dan transportasi $Y = a + bX + e$ Meskipun dampak ekonominya positif, terdapat kekhawatiran terkait ketergantungan yang berlebihan pada sektor ini, yang dapat menyebabkan inflasi harga lokal dan meningkatkan ketimpangan sosial antara masyarakat lokal dan wisatawan.

Tabel 3: Rata-rata Pengeluaran Wisatawan

Kategori Wisatawan	Rata-rata Pengeluaran (IDR)
Wisatawan Domestik	2,500,000
Wisatawan Internasional	5,500,000

3.2. Dampak Sosial dan Budaya

Berdasarkan hasil survei, sektor pariwisata berpotensi meningkatkan perekonomian lokal, terutama melalui pengeluaran wisatawan yang tinggi.

3.3. Dampak infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di IKN mengalami peningkatan signifikan, dengan proyek pembangunan fasilitas transportasi, hotel, dan pusat perbelanjaan yang dirancang untuk mendukung sektor pariwisata. Hasil survei menunjukkan bahwa sektor transportasi dan akomodasi telah diperbaiki untuk mengakomodasi jumlah wisatawan yang terus meningkat. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur ini dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang masyarakat lokal dan wisatawan. Proyek besar yang dilaksanakan juga menimbulkan kekhawatiran terkait dampak sosial dan lingkungan jangka panjang. Tabel 4 menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas, penting untuk merencanakan infrastruktur dengan lebih memperhatikan keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Tabel 4. Proyek Pembangunan Infrastruktur di IKN

Jenis Infrastruktur	Jumlah Proyek yang Sedang Berlangsung
Pembangunan Hotel	15
Pembangunan Pusat Perbelanjaan	5
Fasilitas Transportasi Umum	8
Pembangunan Gedung Pemerintah	3

Meskipun pembangunan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas fasilitas, ada tantangan dalam memastikan bahwa pembangunan yang cepat ini juga mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak jangka panjang bagi masyarakat lokal dan lingkungan sekitar. Penambahan bangunan baru yang terus berlangsung dapat menyebabkan perubahan dalam karakter kawasan dan meningkatkan ketergantungan pada sektor pariwisata sebagai pendorong ekonomi utama. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang matang untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan infrastruktur dan kebutuhan sosial serta lingkungan di kawasan IKN.

3.4. Dampak Lingkungan

Dari hasil penelitian, dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pariwisata massal di IKN menjadi perhatian utama. Beberapa kawasan alami yang digunakan untuk tujuan wisata mulai menunjukkan tanda-tanda degradasi, termasuk penurunan kualitas air dan kerusakan hutan. Ini adalah masalah yang sangat penting, mengingat IKN direncanakan sebagai kota hijau yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Wawancara mendalam dengan para ahli lingkungan mengungkapkan bahwa pengelolaan limbah dan air menjadi dua isu utama yang perlu segera ditangani untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang kawasan ini.

3.5. Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan

Dalam pembahasan mengenai pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pemangku kepentingan setuju bahwa untuk memastikan IKN dapat berkembang secara berkelanjutan, kebijakan yang mendukung pariwisata hijau dan ramah lingkungan harus segera diterapkan. Banyak responden yang mengusulkan penerapan sistem pengelolaan pariwisata yang mengintegrasikan teknologi pintar dan konsep ramah lingkungan dalam setiap aspek, mulai dari transportasi hingga pengelolaan limbah. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata yang berbasis pada keberlanjutan sangat penting agar dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal dapat diminimalkan. Rekomendasi dari beberapa responden termasuk penerapan sistem transportasi berbasis energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efisien, dan pelibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengelolaan pariwisata.

3.6. Persepsi Masyarakat terhadap Pariwisata Massal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat lokal terhadap pariwisata massal di IKN sangat bervariasi. Sebagian besar masyarakat menganggap pariwisata membawa manfaat ekonomi, namun mereka juga mengkhawatirkan ketimpangan yang timbul, seperti kenaikan harga dan pengabaian kebutuhan dasar mereka.

Tabel 5. Persepsi Masyarakat Lokal terhadap Dampak Pariwisata Massal di IKN

Kategori Persepsi	Persentase Responden (%)
Masyarakat yang menganggap pariwisata membawa manfaat ekonomi	65%
Masyarakat yang khawatir terhadap ketimpangan sosial (kenaikan harga, pengabaian kebutuhan dasar)	35%
Masyarakat yang merasa pariwisata berpotensi mengurangi kualitas hidup lokal	28%
Masyarakat yang mendukung pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan	72%

Tabel ini menggambarkan data dari hasil survei yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat lokal melihat pariwisata sebagai peluang ekonomi, namun tetap ada kekhawatiran terkait ketimpangan sosial dan dampak negatif terhadap kualitas hidup

mereka. Sebagian besar responden mendukung kebijakan pengelolaan pariwisata yang lebih berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif tersebut.

3.7. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun IKN memiliki kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang mendukung keberlanjutan, tantangan terbesar adalah pengelolaan air dan limbah yang semakin kompleks akibat meningkatnya jumlah wisatawan. Mayoritas responden menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap keberlanjutan sumber daya alam di IKN, dengan fokus pada pengelolaan air dan kualitas lingkungan yang terancam akibat pariwisata massal.

Tabel 6. Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

Kategori Persepsi	Persentase Responden (%)
Responden yang mengkhawatirkan pengelolaan air dan limbah	70%
Responden yang setuju dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	60%
Responden yang merasa tidak ada cukup kebijakan untuk melindungi sumber daya alam	40%

3.8. Dampak Terhadap Sektor Informal dan Bisnis Lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor informal di IKN, yang meliputi pedagang kaki lima, pengemudi ojek, dan pelaku usaha kecil lainnya, mengalami dampak positif dan negatif dari pariwisata massal. Mayoritas responden merasa bahwa sektor informal perlu mendapatkan dukungan lebih dalam bentuk pelatihan dan akses ke pasar yang lebih luas untuk dapat bersaing dengan sektor formal yang didorong oleh pariwisata.

Tabel 7. Persepsi terhadap Dampak Pariwisata pada Sektor Informal dan Bisnis Lokal

Kategori Persepsi	Persentase Responden (%)
Responden yang merasa sektor informal diuntungkan	45%
Responden yang merasa sektor informal diabaikan	55%
Responden yang setuju sektor informal perlu pelatihan lebih lanjut	78%

3.9. Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak jangka panjang pariwisata massal terhadap kesejahteraan masyarakat lokal masih dirasakan ambigu. Beberapa responden merasa ada peningkatan pendapatan, tetapi banyak yang merasa adanya ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat pariwisata. Kebijakan yang lebih merata dalam distribusi keuntungan diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Tabel 8. Persepsi terhadap Dampak Jangka Panjang Pariwisata pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Kategori Persepsi	Persentase Responden (%)
Responden yang merasa pariwisata meningkatkan kesejahteraan	55%
Responden yang merasa ketimpangan sosial meningkat	45%
Responden yang mendukung kebijakan distribusi yang merata	80%

3.10. Rekomendasi Kebijakan untuk Pengelolaan Pariwisata Massal

Pengelolaan pariwisata massal di Ibu Kota Nusantara (IKN) harus bersinergi dengan konsep kota hijau, yang mengedepankan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologis. IKN mengusung konsep solusi berbasis alam (Nature-Based Solutions/NBS), yang bertujuan mengharmoniskan pembangunan perkotaan dengan pelestarian lingkungan (Pradana et al., 2025). Dalam hal ini, model ekowisata urban dapat menjadi alternatif penting untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif tanpa mengorbankan kelestarian alam. Konsep ini menekankan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal sebagai bagian dari pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan. Model ekowisata urban di IKN diharapkan dapat menciptakan sinergi antara kawasan pemerintahan dan destinasi wisata alam. IKN akan memfokuskan pengembangan pariwisata alam berbasis keberlanjutan, yang tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian lokal, tetapi juga mempertahankan dan melestarikan ekosistem alam yang ada. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor pariwisata dapat menjadi pendorong utama bagi pembangunan ekonomi lokal, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan menciptakan keseimbangan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengelolaan ekowisata yang lebih berkelanjutan di IKN, dengan penekanan pada integrasi konsep kota hijau dalam pengelolaan pariwisata yang mendukung keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologis.

Tabel 9. Konsep Model Ekowisata Urban di IKN

Aspek Pengelolaan Ekowisata	Deskripsi
Integrasi Kawasan Pemerintahan dan Wisata Alam	Menciptakan sinergi antara kawasan pemerintahan dan destinasi wisata alam untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam.
Kolaborasi antara Pemerintah, Sektor Swasta, dan Masyarakat	Pengelolaan ekowisata berbasis kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan dan pelestarian alam.
Pembangunan Infrastruktur Ramah Lingkungan	Infrastruktur yang mendukung pariwisata dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang efisien.
Pengelolaan Ekosistem Alam	Pelestarian ekosistem alam, termasuk hutan tropis, laut, dan keanekaragaman hayati, untuk mendukung pariwisata yang berbasis pada keberlanjutan ekologis.
Pemberdayaan Masyarakat Lokal	Memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam industri pariwisata dan menikmati manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kualitas hidup mereka.
Sustainability in Economic Growth	Meningkatkan perekonomian lokal melalui pariwisata alam, sambil memastikan keberlanjutan sosial dan lingkungan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 10. Rekomendasi Kebijakan untuk Pengelolaan Ekowisata di IKN

Rekomendasi Kebijakan	Persentase Responden (%)
Penerapan kebijakan untuk pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan berbasis energi terbarukan	85%
Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata	80%
Pembatasan jumlah wisatawan di kawasan sensitif untuk menjaga kelestarian alam	75%
Pengelolaan limbah dan konservasi sumber daya alam secara efisien	82%
Kebijakan yang memastikan distribusi manfaat ekonomi pariwisata secara merata di seluruh lapisan masyarakat	70%

Dengan rekomendasi kebijakan ini, diharapkan pengelolaan ekowisata urban di IKN dapat berjalan secara berkelanjutan, menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian alam, dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat lokal

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji dampak pariwisata massal terhadap pengembangan kawasan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan fokus pada aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata massal memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, melalui peningkatan pendapatan lokal, penciptaan

lapangan kerja, serta pengembangan infrastruktur. Namun, dampak negatif yang ditimbulkan, seperti ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan tekanan terhadap infrastruktur, perlu dikelola dengan hati-hati untuk menjaga keberlanjutan IKN sebagai kota hijau. Analisis regresi linier dan uji t menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara jumlah wisatawan dan peningkatan pendapatan lokal serta kualitas infrastruktur. Meskipun demikian, penelitian ini juga menyoroti tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan pelestarian ekologis. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata massal yang berkelanjutan sangat penting untuk menghindari dampak negatif yang dapat merusak kualitas hidup masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan di IKN memperkenalkan kebijakan yang mendorong pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan. Pengelolaan yang baik dapat meminimalkan dampak negatif pariwisata massal terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan meliputi peningkatan infrastruktur ramah lingkungan, penerapan sistem transportasi publik berbasis energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efisien, serta pembatasan jumlah wisatawan di kawasan sensitif untuk menjaga ekosistem alami. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengelolaan pariwisata guna memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dinikmati secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks keberlanjutan, pengelolaan sektor pariwisata di IKN harus memprioritaskan prinsip keberlanjutan dengan mempertimbangkan kapasitas infrastruktur dan daya dukung lingkungan. Penerapan teknologi pintar dan konsep ramah lingkungan dalam pengelolaan pariwisata akan berkontribusi besar dalam menciptakan kota hijau yang berkelanjutan. Kebijakan pengelolaan yang berfokus pada pengaturan jumlah wisatawan di kawasan sensitif juga perlu diterapkan untuk menghindari kerusakan alam yang lebih parah.

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang berharga, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian ini hanya melibatkan 400 responden, yang meskipun representatif, masih terbatas dalam mencakup seluruh masyarakat di IKN. Penelitian lebih lanjut dapat mempertimbangkan sampel yang lebih besar atau memperluas jangkauan geografis untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif dari masyarakat dan pemangku kepentingan yang lebih luas. Keterbatasan kedua adalah dalam hal data kuantitatif yang dikumpulkan melalui survei. Meskipun data ini memberikan gambaran umum tentang dampak pariwisata massal, beberapa responden mungkin memiliki bias tertentu dalam memberikan jawaban mereka. Oleh karena itu, pengumpulan data yang lebih mendalam melalui observasi lapangan dan studi longitudinal dapat membantu memperkuat temuan ini. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya perencanaan dan pengelolaan pariwisata yang berbasis pada keberlanjutan dalam rangka menciptakan model ekowisata urban yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan di kawasan IKN.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan wawasan berharga melalui wawancara, serta kepada seluruh tim penelitian yang telah bekerja keras dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Terima kasih juga kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan serta Institut Teknologi Bandung yang memberikan dukungan pendanaan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

5. REFERENSI

- Asmuni, & Farida, U. J. (2024). Relocating the Capital City of Indonesia: A Maqāsid-Based Critical Evaluation. *Millah: Journal of Religious Studies*, 23(2), 913–946. <https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss2.art13>
- Ciuculescu, E. L., & Luca, F. A. (2024). How Can Cities Build Their Brand through Arts and Culture? An Analysis of ECoC Bidbooks from 2020 to 2026. *Sustainability (Switzerland)*, 16(8). <https://doi.org/10.3390/su16083377>
- Jati, W. R., Syahid, C. N., Lissandhi, A. N., & Maulana, Y. (2023). Assessing the Implementation of a ‘City for All’ within the New Indonesian Capital City: Smart and Green City Perspective. *Journal of Regional and City Planning*, 34(3), 232–247. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2023.34.3.1>
- Klingmann, A. (2022). Re-scripting Riyadh’s historical downtown as a global destination: a sustainable model? *Journal of Place Management and Development*, 15(2), 93–111. <https://doi.org/10.1108/JPM-07-2020-0071>
- Marzuki, M., Ramadhan, R., Yusnaini, H., Vonnisa, M., Safitri, R., & Yanfatriani, E. (2023). Changes in Extreme Rainfall in New Capital of Indonesia (IKN) Based on 20 Years of GPM-IMERG Data. *Trends in Sciences*, 20(11). <https://doi.org/10.48048/tis.2023.6935>
- Marzuki, S., Heryansyah, D., & Hadi, S. (2024). Neglecting Laws and Rights of Local Communities: A Human Rights-Based Approach Analysis of the Development of Indonesia’s New Capital City. *Brawijaya Law Journal*, 11(2), 215–241. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2024.011.02.03>
- Perwira, I., Harijanti, S. D., Susanto, M., & Adhihernawan, M. Y. (2024). Capital city relocation in Indonesia: compromise failure and potential dysfunction. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2345930>
- Puspitasari, D. A., Karlina, Y., Hernina, Kurniawan, Sutejo, & Danardana, A. S. (2024). Language Choices and Digital Identity of High School Student Text Messages in the New Capital City of Indonesia: Implication for Language Education. *International Journal of Language Education*, 8(1), 162–184. <https://doi.org/10.26858/ijole.v8i1.63833>
- Rachmawati, R., Haryono, E., Ghiffari, R. A., Reinhart, H., Fathurrahman, R., Rohmah, A. A., Permatasari, F. D., Sensuse, D. I., Sunindyo, W. D., & Kraas, F. (2024). Achieving Sustainable Urban Development for Indonesia’s New Capital City. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(2), 443–456. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190204>
- Rachmawati, R., Rohmah, A. A., Reinhart, H., Ghiffari, R. A., Sensuse, D. I., & Sunindyo, W. D. (2023). Smart City development in “Nusantara”, the new capital of Indonesia: local government and community readiness. *Human Geographies*, 17(2), 127–148. <https://doi.org/10.5719/hgeo.2023.172.2>
- Rachmawati, R., Rohmah, A. A., Reinhart, H., Sensuse, D. I., & Sunindyo, W. D. (2024). Metaverse, Digital Twins, and Smart Sustainable Urban Development Concepts for Nusantara Capital City, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(12), 4613–4621. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.191210>
- Sadykova, D., Mamirova, K., Asenov, A., Kenzhebaj, R., & Kubessova, G. (2025). LEVERAGING ASTANA’S TOURISM TO BUILD A “BRAND CITY” REPUTATION. *Revista Iberoamericana de Viticultura Agroindustria y Ruralidad*, 12(34), 109–124. <https://doi.org/10.35588/cb84nm08>
- Sensuse, D. I., Putro, P. A. W., Rachmawati, R., & Sunindyo, W. D. (2022a). Initial Cybersecurity Framework in the New Capital City of Indonesia: Factors, Objectives, and Technology. In *Information (Switzerland)* (Vol. 13, Issue 12). MDPI. <https://doi.org/10.3390/info13120580>
- Sensuse, D. I., Putro, P. A. W., Rachmawati, R., & Sunindyo, W. D. (2022b). Initial Cybersecurity Framework in the New Capital City of Indonesia: Factors, Objectives, and Technology. In *Information (Switzerland)* (Vol. 13, Issue 12). MDPI. <https://doi.org/10.3390/info13120580>
- Warouw, F. F., Pusung, P. H., Herdiawanto, H., & Luthfi, R. M. (2024). BRANDING SUSTANABLE FOREST CITY AT IBU KOTA NEGARA (IKN) NUSANTARA

VIEWED FROM THE PERCEPTION OF PENTAHHELIX STAKEHOLDERS IN MANADO CITY. *INDONESIAN JOURNAL OF URBAN AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY*, 42–55. <https://doi.org/10.25105/urbanenvirotech.v7i1.19317>

Warouw, F., Takumansang, E. D., Manado, S. R., Pengajar, S., Arsitektur, J., Sam, U., & Manado, R. (2018). PERENCANAAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI SAWANGAN DI KOTA MANADO. In *Jurnal Spasial* (Vol. 5, Issue 1).